Inklusif: Jurnal Sosial Humaniora dan Peradaban Nusantara
Volume: 1, Nomor: 3, (2026), September: 140 - 149
Website: https://ejournal.ojs-lppm.com/index.php/Inklusif/article/view/503
E-ISSN: 3164-4422

Keadilan Sosial dalam Penerimaan KIP Kuliah: Analisis Ketepatan Sasaran Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa (Studi Kasus pada Mahasiswa Universitas Negeri Medan)

Ayu Grafella Br Sihombing[1], Aulia Haqqi Herfandani[2], Adrian Sika Purba[3], Fara Aqila Fizri[4], Keysani Gabriella Simbolon[5]
Program Studi Akuntansi, Universitas Negeri Medan, Indonesia [1,2,3,4,5]
Corresponding Author: *ayuhombing09@gmail.com[1*]*

Info Artikel
Received: *29 Agustus 2026*
Revised : *07 September 2026*
Accepted: *16 September 2026*
Published: *30 September 2026*

Keywords: *social justice, KIP kuliah, economic decile, targeting accuracy, educational assistance.*

Abstract
This study analyzes social justice in the distribution of the Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah scholarship, focusing on the accuracy of educational-assistance targeting among university students. The central issue examined is the alleged mismatch between applicants' as signed economic decile and their actual household economic condition, which potentially causes financially disadvantaged students to fail selection while relatively better-off students are accepted. Using a qualitative approach with semi-structured interviews, this research involved students who passed the KIP Kuliah selection and applicants who were rejected at Universitas Negeri Medan. The findings indicate that decile data used as the basis for eligibility is frequently perceived as failing to reflect applicants' current economic conditions, resulting in mistargeting and a strong sense of injustice among rejected students despite greater financial need. These findings affirm that social justice in educational-assistance distribution depends not only on procedural mechanisms but also on the accuracy and validity of the underlying data. The study recommends periodic updates of welfare data, stronger field verification, and a transparent appeal mechanism for applicants disadvantaged by erroneous decile classification.

Kata Kunci*:* keadilan sosial, KIP kuliah, desil ekonomi, ketepatan sasaran, bantuan pendidikan.

Abstrak
Penelitian ini bertujuan menganalisis keadilan sosial dalam penerimaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, dengan fokus pada ketepatan sasaran bantuan pendidikan bagi mahasiswa. Persoalan utama yang diangkat adalah dugaan ketidaksesuaian antara penetapan desil ekonomi keluarga pendaftar dan kondisi ekonomi keluarga yang sebenarnya, yang berpotensi menyebabkan mahasiswa dari keluarga kurang mampu gagal memperoleh bantuan, sementara mahasiswa dengan kondisi ekonomi yang relatif lebih baik justru dinyatakan lolos. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara semi-terstruktur terhadap mahasiswa yang lolos seleksi KIP Kuliah dan mahasiswa pendaftar yang tidak lolos seleksi di Universitas Negeri Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data desil yang menjadi dasar penentuan kelayakan sering kali dipersepsikan tidak mencerminkan kondisi ekonomi terkini keluarga pendaftar, sehingga menimbulkan ketidaktepatan sasaran serta persepsi ketidakadilan yang kuat di kalangan mahasiswa yang gagal lolos meskipun secara ekonomi lebih membutuhkan. Temuan ini menegaskan bahwa keadilan sosial dalam distribusi bantuan pendidikan tidak hanya bergantung pada mekanisme

prosedural, tetapi juga pada akurasi dan validitas data yang menjadi dasar pengambilan keputusan. Penelitian merekomendasikan pemutakhiran data kesejahteraan secara berkala, penguatan verifikasi lapangan, serta penyediaan mekanisme banding yang transparan bagi pendaftar yang merasa dirugikan oleh penetapan desil yang keliru.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

PENDAHULUAN

Pendidikan tinggi merupakan salah satu instrumen utama mobilitas sosial dan pengurangan kesenjangan ekonomi antargenerasi. Pemerintah Indonesia melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah berupaya membuka akses pendidikan tinggi bagi lulusan SMA/SMK dari keluarga kurang mampu secara ekonomi namun memiliki potensi akademik yang baik (Habibi, 2025). Program ini dirancang sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap kelompok rentan agar tidak tertinggal dalam mengakses pendidikan tinggi akibat keterbatasan biaya. Namun demikian, berbagai kajian menunjukkan bahwa implementasi program ini masih diwarnai persoalan ketepatan sasaran, di mana mahasiswa yang secara ekonomi tergolong mampu tetap dapat lolos seleksi, sementara mahasiswa yang benar-benar membutuhkan justru gagal (Jannah dkk., 2025; Khairunnisa dkk., 2024).

Salah satu akar persoalan ketidaktepatan sasaran tersebut terletak pada penggunaan data desil kesejahteraan ekonomi sebagai basis utama penentuan kelayakan pendaftar. Desil ekonomi merupakan pengelompokan status kesejahteraan penduduk yang bersumber dari basis data kependudukan dan kesejahteraan sosial nasional. Idealnya, data ini menjadi acuan objektif dalam menentukan siapa yang berhak menerima bantuan. Akan tetapi, dalam praktiknya, data desil kerap tidak diperbarui secara berkala dan tidak selalu mencerminkan kondisi ekonomi riil suatu keluarga pada saat pendaftaran dilakukan (Khairunnisa dkk., 2024; Saputra dkk., 2025). Akibatnya, tidak sedikit pendaftar yang secara faktual berasal dari keluarga kurang mampu justru ditetapkan berada pada desil yang lebih tinggi daripada kondisi sebenarnya, sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat, sementara pendaftar lain dengan kondisi ekonomi yang relatif lebih baik justru memperoleh penetapan desil rendah dan lolos seleksi.

Persoalan ini erat kaitannya dengan konsep keadilan sosial (social justice) dalam kebijakan publik, yang menekankan bahwa distribusi sumber daya dan bantuan negara harus didasarkan pada kebutuhan riil serta prinsip kesetaraan perlakuan bagi setiap warga negara (Sunaryo, 2017; Wibowo, 2024). Keadilan sosial tidak semata dinilai dari terselenggaranya suatu program bantuan, melainkan

juga dari sejauh mana hasil distribusi tersebut benar-benar menjangkau kelompok yang paling membutuhkan. Ketika instrumen penentu kelayakan, dalam hal ini data desil, tidak akurat, esensi keadilan distributif menjadi tereduksi, karena keputusan yang seharusnya berbasis kebutuhan riil justru ditentukan oleh data administratif yang keliru (Khairunnisa dkk., 2024; Pasaribu dkk., 2026).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengonfirmasi persoalan ini dari berbagai sudut pandang. Metti dkk. (2025) menemukan bahwa ketidaktepatan sasaran bantuan sosial berbasis data kerap terjadi akibat perbedaan interpretasi data dan lemahnya validasi di tingkat pelaksana. Pasaribu dkk. (2026) menyoroti bahwa subjektivitas verifikator turut memengaruhi hasil akhir seleksi, sehingga prinsip keadilan sosial belum sepenuhnya tercermin dalam distribusi KIP Kuliah. Martins dan Toletina (2024) menunjukkan bahwa inkonsistensi prosedur verifikasi antarperguruan tinggi turut memperbesar potensi kesalahan penetapan sasaran, sementara Purba dkk. (2025) menambahkan bahwa peningkatan alokasi anggaran KIP Kuliah dari tahun ke tahun ternyata tidak serta-merta menyelesaikan persoalan ketepatan sasaran, yang mengindikasikan bahwa akar masalah bukan pada besaran anggaran, melainkan pada kualitas dan akurasi data yang digunakan sebagai dasar seleksi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis secara lebih mendalam bagaimana persoalan penetapan desil ekonomi memengaruhi ketepatan sasaran dan keadilan sosial dalam distribusi KIP Kuliah, dengan menghadirkan dua perspektif mahasiswa sekaligus: mereka yang berhasil lolos seleksi dan mereka yang gagal meskipun mengaku secara ekonomi membutuhkan. Perbandingan dua perspektif ini penting untuk memahami kesenjangan antara das sollen (ketentuan ideal penetapan desil sebagai instrumen objektif) dan das sein (realitas di lapangan, di mana penetapan desil dipersepsikan tidak selalu mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya). Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi kajian keadilan sosial dalam kebijakan bantuan pendidikan, sekaligus manfaat praktis berupa rekomendasi perbaikan sistem data dan mekanisme verifikasi bagi pemerintah, perguruan tinggi, dan pengelola program KIP Kuliah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai persepsi, pengalaman, dan penilaian subjektif informan terhadap ketepatan sasaran dan keadilan sosial dalam penerimaan KIP Kuliah (Rachmawati, 2007). Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu mengungkap dimensi keadilan yang tidak dapat sepenuhnya terukur melalui data kuantitatif, terutama terkait persepsi ketidakadilan akibat penetapan

desil ekonomi yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi riil.

Penelitian dilaksanakan di Universitas Negeri Medan (Unimed), dengan pertimbangan bahwa Unimed merupakan salah satu perguruan tinggi negeri dengan jumlah penerima dan pendaftar KIP Kuliah yang besar di Provinsi Sumatera Utara.

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling dan terdiri atas dua kelompok mahasiswa agar diperoleh gambaran yang berimbang, yaitu: (1) mahasiswa penerima KIP Kuliah yang dinyatakan lolos seleksi, untuk menggali persepsi mengenai proses penetapan kelayakan dan kesesuaian desil dengan kondisi ekonomi mereka; dan (2) mahasiswa pendaftar yang tidak lolos seleksi, khususnya yang menilai penetapan desil ekonominya tidak sesuai dengan kondisi riil keluarga, untuk menggali pengalaman dan dampak dari ketidaksesuaian data tersebut.

Teknik pengumpulan data utama adalah wawancara semi-terstruktur, yang memungkinkan peneliti menggali secara fleksibel dan mendalam pengalaman, rasa keadilan, serta kekecewaan informan terkait proses seleksi (Rosaliza, 2015). Instrumen penelitian yang digunakan meliputi pedoman wawancara, alat perekam suara, dan catatan lapangan untuk mendokumentasikan informasi verbal maupun nonverbal (Patras, 2023). Data hasil wawancara kemudian ditranskripsi dan dianalisis secara tematik melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan menekankan pola persepsi ketidakadilan yang muncul akibat ketidaksesuaian data desil ekonomi, guna memperoleh temuan yang kredibel mengenai relasi antara akurasi data dan keadilan sosial dalam distribusi bantuan pendidikan KIP Kuliah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perspektif Mahasiswa Penerima (Lolos Seleksi) KIP Kuliah

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan dengan beberapa mahasiswa Universitas Negeri Medan yang dinyatakan lolos seleksi KIP Kuliah, menunjukkan bahwa secara umum proses pendaftaran dan verifikasi administratif dinilai cukup mudah dipahami. Namun, proses tersebut membutuhkan cukup banyak dokumen dan pengurusan administrasi, seperti bukti pajak kendaraan, bukti kepemilikan tanah atau rumah, serta surat keterangan tidak mampu yang perlu diurus melalui kantor desa atau kelurahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses penerimaan KIP Kuliah tidak hanya bergantung pada pendaftaran melalui sistem, tetapi juga pada kesiapan mahasiswa dan keluarga dalam memenuhi berbagai persyaratan administratif.

Salah satu informan menjelaskan bahwa dirinya mengetahui keluarganya berada pada desil 1

setelah melakukan pengecekan secara mandiri menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui aplikasi Cek Bansos. Menurut informan, penetapan desil 1 tersebut sesuai dengan kondisi ekonomi keluarganya. Dengan kondisi tersebut, informan menilai bahwa proses seleksi yang dialaminya cukup adil dan memberikan penilaian sekitar 8 dari 10. Penilaian tersebut terutama didasarkan pada pengalaman pribadinya yang berhasil lolos dan memperoleh bantuan pendidikan KIP Kuliah.

Namun, menariknya meskipun informan sendiri merasa bahwa penetapan desil terhadap keluarganya sudah sesuai, ia tidak secara langsung menganggap bahwa sistem penerimaan KIP Kuliah secara keseluruhan sudah berjalan dengan adil. Informan justru menyampaikan adanya kemungkinan bahwa terdapat mahasiswa lain yang kondisi ekonominya relatif lebih baik tetapi tetap memperoleh KIP Kuliah. Menurut pengamatannya, hal tersebut dapat terjadi karena adanya perbedaan kemampuan dalam melengkapi dokumen, memberikan keterangan kepada pihak pendata, maupun mengurus perubahan atau penurunan tingkat desil melalui pihak desa.

Informan juga menyampaikan adanya kemungkinan seseorang yang sebelumnya berada pada Desil 5 dapat berubah menjadi Desil 3 setelah melakukan pengurusan tertentu bersama pihak pendata di tingkat desa. Pernyataan ini tidak dapat langsung dijadikan bukti bahwa telah terjadi manipulasi data, tetapi menunjukkan adanya keraguan dari mahasiswa terhadap proses pendataan dan validasi ekonomi yang menjadi dasar penentuan penerima. Dengan kata lain, persoalan yang dirasakan bukan hanya mengenai siapa yang lolos atau tidak lolos, tetapi juga mengenai apakah data yang digunakan untuk menentukan kelayakan tersebut benar-benar menggambarkan keadaan ekonomi keluarga yang sebenarnya.

Temuan tersebut menjadi penting karena mahasiswa yang telah menerima KIP Kuliah pun masih mempertanyakan ketepatan sistem secara keseluruhan. Artinya, rasa keadilan tidak hanya muncul ketika seseorang memperoleh bantuan, tetapi juga ketika mahasiswa melihat bahwa mahasiswa lain dengan kondisi ekonomi yang berbeda dapat memperoleh hasil yang sama. Hal ini memperlihatkan bahwa keberhasilan seorang mahasiswa menerima KIP Kuliah belum tentu menunjukkan bahwa keseluruhan meknisme distribusi bantuan telah sepenuhnya tepat sasaran. Ketergantungan terhadap kualitas data di tingkat desa tetap menjadi salah satu bagian yang perlu diperhatikan dalam proses seleksi.

Dengan demikian, pengalaman mahasiswa penerima menunjukkan dua hal sekaligus. Pertama, bagi mahasiswa yang datanya sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya, sistem dapat memberikan

manfaat sebagaimana tujuan program KIP Kuliah. Kedua, masih terdapat kekhawatiran mengenai akurasi data dan proses verifikasi yang dapat memengaruhi penerima lain. Temuan ini sejalan dengan persoalan yang dibahas dalam penelitian terdahulu mengenai lemahnya validasi data kesejahteraan yang dapat menyebabkan bantuan pendidikan tidak sepenuhnya tepat sasaran (Khairunnisa dkk., 2024).

Perspektif Mahasiswa yang Tidak Lolos Seleksi

Sementara itu, kelompok mahasiswa yang tidak lolos seleksi, menunjukkan persepsi keadilan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan kelompok mahasiswa yang lolos, masing-masing memberi skala 3 dari 10 dengan kecenderungan menilai proses tersebut belum adil. Rendahnya penilaian tersebut terutama disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian antara kondisi ekonomi keluarga yang mereka rasakan dengan data desil yang digunakan dalam proses seleksi.

Salah satu informan menjelaskan bahwa keluarganya tercatat dalam Desil 10. Menurut informan, kondisi tersebut tidak menggambarkan keadaan ekonomi keluarganya yang sebenarnya. Ia menilai bahwa kondisi keluarganya lebih sesuai apabila berada pada kelompok Desil 4 atau 5. Perbedaan tersebut kemudian menjadi persoalan karena desil merupakan salah satu bagian penting yang digunakan dalam menentukan kelayakan calon penerima KIP Kuliah. Informan merasa bahwa dirinya memiliki kebutuhan terhadap bantuan pendidikan, tetapi tidak dapat melanjutkan proses penerimaan karena data ekonomi yang digunakan dalam sistem tidak sesuai dengan kondisi yang dialaminya.

Pengalaman yang hampir sama juga disampaikan oleh mahasiswa lain yang mengetahui bahwa dirinya berada pada kisaran Desil 4 atau 5 ketika melakukan pendaftaran. Namun, setelah melihat rincian pendapatan dan indikator ekonomi yang terdapat dalam sistem, informan merasa bahwa informasi tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan keadaan ekonomi keluarganya di lapangan. Menurut informan, terdapat perbedaan antara apa yang tercatat dalam sistem dengan kondisi mereka yang sebenarnya.

Dari hasil wawancara tersebut, kelompok mahasiswa yang tidak lolos bukan hanya mempermasalahkan kelengkapan dokumen. Mereka lebih menyoroti hasil penetapan Desil yang menurut mereka tidak menggambarkan kondisi ekonomi keluarga secara nyata. Hal ini menjadi penting karena mahsiswa dapat saja telah memenuhi kesempatan yang sama apabila data ekonomi yang menjadi dasar seleksi sejak awal sudah tidak sesuai.

Permasalahan tersebut kemudian semakin terasa karena sebagian informan menyatakan bahwa

tidak pernah ada survei atau verifikasi langsung ke rumah mereka. Data yang digunakan dalam proses seleksi menurut pengalaman mereka lebih banyak berasal dari basis data DTKS/Dinas Sosial dan sistem pendaftaran yang telah tersedia. Kondisi ini membuat mahasiswa yang merasa datanya tidak sesuai mengalami kesulitan untuk membuktikan keadaan ekonominya secara langsung.

Salah satu informan juga menjelaskan bahwa dirinya tidak mendapatkan penjelasan secara rinci mengenai alasan ketidaklolosannya. Informan hanya memperoleh informasi bahwa status pendaftarannya adalah "Tidak Lolos". Setelah merasa tidak mengetahui penyebabnya, ia kemudian mencari informasi secara mandiri dan baru mengetahui bahwa datanya tidak tercatat dalam DTKS setelah bertanya kepada operator Tata Usaha di sekolahnya. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa informasi mengenai alasan ketidaklolosan masih dirasakan belum cukup jelas oleh pendaftar.

Permasalahan tidak berhenti pada ketidakjelasan alasan ketidaklolosan. Informan juga menyampaikan bahwa dirinya tidak mengetahui dengan jelas kemana harus mengajukan keberatan atau melakukan perbaikan apabila terdapat kesalahan pada data desil. Mahasiswa lain yang diwawancarai juga menyampaikan hal yang serupa. Mereka tidak memperoleh informasi yang jelas mengenai mekanisme pengaduan atau banding apabila merasa bahwa data ekonomi yang digunakan dalam seleksi tidak sesuai dengan kondisi keluarga mereka.

Keadaan tersebut dapat memperbesar rasa tidak adil yang dirasakan mahasiswa. Bagi mahasiswa yang merasa kondisi ekonominya sebenarnya membutuhkan bantuan, keputusan "Tidak Lolos" tanpa penjelasan mengenai penyebab dan tanpa saluran koreksi yang jelas dapat membuat mereka merasa bahwa kesempatan untuk memperbaiki keadilan dalam penerimaan KIP Kuliah tidak hanya berkaitan dengan hasil akhir berupa diterima atau tidak diterima, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana mahasiswa diperlakukan selama proses seleksi dan apakah mereka diberikan kesempatan untuk memperbaiki data yang dianggap tidak sesuai.

Desil Ekonomi sebagai Sumber Ketidakadilan Sosial

Temuan dan hasil wawancara dari kedua kelompok informan di atas menunjukkan bahwa persoalan ketepatan sasaran KIP Kuliah tidak dapat dilepaskan dari kualitas data yang menjadi basis pengambilan keputusan. Baik mahasiswa yang lolos maupun yang tidak lolos sama-sama mempersoalkan akurasi desil, mereka mengakui bahwa penetapan desil sangat bergantung pada kualitas pendataan desa dan berpotensi dimanipulasi melalui pengurusan penurunan desil, dan mereka merasa dirugikan secara langsung karena desil yang ditetapkan bagi keluarga mereka dipersepsikan jauh dari kondisi ekonomi riil. Dalam kerangka keadilan sosial, distribusi bantuan yang adil

semestinya didasarkan pada kebutuhan riil penerima (need-based distribution), bukan semata pada klasifikasi administratif yang bersifat statis dan tidak diperbarui secara berkala (Sunaryo, 2017). Ketika desil ekonomi, sebagai instrumen penentu utama kelayakan, dipersepsikan tidak mencerminkan kondisi faktual keluarga pendaftar, yang terjadi bukan sekadar kesalahan teknis administratif, melainkan indikasi pelanggaran terhadap prinsip keadilan distributif itu sendiri, karena hak atas bantuan pendidikan berisiko gagal disalurkan kepada pihak yang secara nyata paling membutuhkan (Khairunnisa dkk., 2024; Pasaribu dkk., 2026).

Persepsi para informan yang menyatakan bahwa penetapan desil yang tidak disarkan pada kondisi rill perekonomiannya sejalan dengan temuan kajian kebijakan bahwa data kesejahteraan dari Pusdatin Kesos/DTKS yang menjadi rujukan utama sistem KIP Kuliah kerap tidak akurat dan tidak mutakhir, sehingga calon penerima yang sebenarnya memenuhi kriteria justru tidak terdata dengan tepat, sementara pihak yang secara rill tidak seharusnya mendapat bantuan tersebut justru masuk ke dalam daftar penerima (Saputra dkk., 2025). Kondisi ini menegaskan bahwa persoalan tersebut bersifat struktural pada tingkat sumber data, bukan semata kesalahan individual pendaftar. Selain itu, minimnya pelaksanaan verifikasi langsung ke lapangan yang dialami oleh seluruh informan, baik yang lolos maupun tidak lolos, memperlihatkan bahwa asas correctability, yaitu kemampuan sistem untuk mengoreksi kesalahan data secara memadai, belum terpenuhi dalam praktik penyaluran KIP Kuliah (Hidayat Muhtar dkk., 2025). Dengan demikian, perbaikan program KIP Kuliah tidak cukup hanya berfokus pada penguatan prosedur di tingkat perguruan tinggi, tetapi juga memerlukan pembenahan pada sumber data kesejahteraan di tingkat nasional serta penyediaan kanal komunikasi yang memungkinkan koreksi data desil dilakukan secara cepat, responsive serta efektif dan efesien.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa ketidakadilan dan ketidaktepatsasaran dalam penerimaan KIP Kuliah sebagian besar bersumber dari kesenjangan antara penetapan desil ekonomi dan kondisi ekonomi riil keluarga pendaftar. Mahasiswa yang secara faktual berasal dari keluarga kurang mampu dapat gagal lolos seleksi akibat klasifikasi desil yang dipersepsikan keliru, sementara sebagian pendaftar dengan kondisi ekonomi yang relatif lebih baik berpotensi tetap lolos karena ketidaktepatan penetapan desil pendaftar. Persoalan ini bersifat struktural, karena data desil bersumber dari basis data kesejahteraan sosial nasional yang minim verifikasi langsung ke lapangan, sementara mekanisme banding atau komplain bagi pendaftar yang merasa dirugikan masih sangat

terbatas atau bahkan informan tidak tau gimana Solusi nya . Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keadilan sosial dalam distribusi KIP Kuliah belum sepenuhnya terwujud, baik dari sisi keadilan distributif (ketepatan hasil) maupun keadilan prosedural (akurasi dan koreksi data). Oleh karena itu, diperlukan pemutakhiran data kesejahteraan sosial secara berkala, penguatan verifikasi lapangan yang merata bagi seluruh pendaftar, serta penyediaan mekanisme banding data desil yang transparan dan mudah diakses, agar penyaluran bantuan pendidikan KIP Kuliah dapat benar-benar menjangkau mahasiswa yang paling membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

Amin, F., Susmayanti, R., Fuqoha, Silaswaty Faried, F., Suwandoko, Aziz Zaelani, M., Agustiwi, A., Herlina, Y., Permana, D. Y., Yudanto, D., Hidayat Muhtar, M., Mulyana Hadi, A., Widodo, I. S., & Rizaldi, M. (2023). Ilmu perundang-undangan. PT Sada Kurnia Pustaka.

Habibi, I. A. (2025). Efektivitas penggunaan Kartu Indonesia Pintar (KIP): Analisis dampak dan tantangan implementasi dalam perspektif manajemen keuangan sekolah. Al-Amin: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial Humaniora, 3(1), 13–29.

Hidayat Muhtar, M., Awaluddin, A., Nurhayati Mardin, N., & Kusuma Dewi, M. N. (2025). Filsafat hukum: Refleksi atas moralitas dan keadilan dalam sistem hukum modern. Eureka Media Aksara.

Jannah, R., Oktavian, D., & Syahputra, A. R. (2025). Analisis efektivitas kebijakan penyaluran beasiswa KIPK Aspirasi di Indonesia. Media Hukum Indonesia, 4(1), 799–808.

Khairunnisa, N. J., Ahmad, A. N., Raihan, M., Azri, A., & Fattah, A. A. (2024). Prinsip keadilan dalam pendistribusian Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) di Indonesia. IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, 13(1).

Martins, E. K., & Toletina, N. T. (2024). Evaluasi pelaksanaan kebijakan program KIP-K di Indonesia. Jurnal Professional, 11(1), 331–340.

Metti, M. M. E., Sareng, Y. Y., Welin, E. D. M., Kelen, V. B., & Sius, K. T. (2025). Optimalisasi ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial Kartu Indonesia Pintar (KIP) pada masyarakat Desa Pasir Putih Kecamatan Nagawutung Kabupaten Lembata. Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat, 8(4), 551–553.

Pasaribu, M. I. K., Siahaan, P. G., Akbar, A. H., Tampubolon, G., Ramadhani, Z., Ginting, B. B., Tampubolon, P., & Simanullang, S. (2026). Analisis keadilan distribusi beasiswa KIP Kuliah oleh pemerintah daerah berdasarkan prinsip keadilan sosial Pancasila pada mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial. MESIR: Journal of Management Education Social Sciences Information and Religion, 3(1), 60–63.

Patras, Y. E. (2023). Organizational citizenship behavior di perguruan tinggi (R. Hidayat, Ed.).

Indonesia Emas Group.

Purba, J. A., Tamba, A. A., Napitu, K. A., Munthe, R. P., & Sinaga, E. (2025). Analisis pengeluaran APBN pada bidang pendidikan dan perkembangan penerima KIP mahasiswa tahun 2022–2025. Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi, 2(6), 401–410.

Putra, M. Z. E. (2026). Ideologi dalam wacana efisiensi beasiswa KIP-Kuliah 2025 Kompas.com: Analisis wacana kritis Norman Fairclough. Jurnal Bahasa dan Sastra, 13(1), 68–79.

Rachmawati, I. N. (2007). Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif: Wawancara. Jurnal Keperawatan Indonesia, 11(1), 35–40.

Rosaliza, M. (2015). Wawancara, sebuah interaksi komunikasi dalam penelitian kualitatif. Jurnal Ilmu Budaya, 11(2), 71–79.

Saputra, B. P., Suryani, E. I., & Yonawati. (2025). Implementasi kebijakan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam meningkatkan akses pendidikan. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 5(2), 1467–1476.

Sunaryo. (2017). Etika berbasis kebebasan Amartya Sen: Integrasi kebebasan dalam pilihan sosial, demokrasi, dan pembangunan. Gramedia Pustaka Utama.

Wibowo, M. (2024). Relasi kekuasaan, negara, dan hukum. PT Pustaka Obor Indonesia.